

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel Pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan Upah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia tahun 2008 - 2013. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) Pendidikan dan Upah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia tahun 2008 – 2013 menunjukkan bahwa besarnya nilai R^2 cukup tinggi yaitu 0.955415. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk cukup baik dimana 95,54 persen variasi variabel dependen partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dijelaskan dengan baik oleh kedua variabel

independen yakni pendidikan dan upah. Sedangkan 4,46 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model.

2. Variabel pendidikan (rata-rata lama sekolah) mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Dimana variabel pendidikan memiliki nilai koefisien β sebesar 0.489199 yang artinya, apabila rata-rata lama sekolah penduduk naik sebesar 1 tahun, maka akan menaikkan 1 tahun partisipasi angkatan kerja sebesar 0.489199 persen.
3. Variabel upah mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan¹²⁴ dimana variabel upah memiliki nilai koefisien β sebesar 2.025984 yang artinya, apabila upah mengalami kenaikan upah sebesar satu juta rupiah akan menaikkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 2.025984 persen.
4. Berdasarkan perhitungan dengan uji F (uji simultan) diperoleh nilai $F_{hitung} = 125.1632$ sedangkan nilai $F_{tabel} = 3,89$. Maka nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen kedua variabel independen (rata-rata lama bersekolah dan rata-rata upah) secara bersama-sama terbukti signifikan mempengaruhi angka presentase tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada setiap provinsi di Indonesia

B. Implikasi

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat disajikan terpisah antara laki-laki dan perempuan guna mengetahui sejauhmana tingkat partisipasi perempuan dalam bekerja.

Indonesia sebagai negara berkembang berupaya meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui peningkatan pendidikan dan upah. Meningkatnya pendidikan tentu akan memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama pendidikan di masing-masing provinsi. Selain itu, meningkatnya tingkat upah tentu akan meningkatkan keinginan mereka untuk terjun kedalam pasar tenaga kerja yang ditandai dengan rata-rata upah di masing-masing provinsi. Untuk itu implikasi dari penelitian ini diharapkan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama untuk fokus dalam pembentukan sumber daya manusia.

C. Saran

Berdasarkan implikasi dari peneliti, maka penelitian memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan tingkat pendidikan yang ada di masyarakat.
 - b. Meningkatkan tingkat upah yang berlaku.

2. Untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan maka pendidikan harus ditingkatkan dengan cara :
 - a. Menyetarakan rata-rata lama sekolah di Indonesia yaitu dengan menuntaskan program wajib belajar 12 tahun serta menyetarakan sarana dan prasarana pendidikan yang akan menunjang mereka dalam kegiatan pendidikan.
 - b. Pembinaan softskill dan lifeskill kepada tenaga kerja baik yang belum tamat sekolah ataupun hanya lulusan sekolah dasar agar dapat bersaing di pasar kerja dan juga setelah lulus dari pembinaan supaya diberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang mereka miliki.
3. Untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, maka upah harus ditingkatkan dengan cara:
 - a. Pemerintah dalam menentukan tingkat upah baru menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja dan keadaan ekonomi daerah agar tidak terjadi kekacauan upah yang akhirnya dapat mengurangi partisipasi angkatan kerja perempuan.
 - b. Pemerintah juga harus bersikap tegas kepada para pengusaha yang tidak memberikan upah sesuai dengan yang telah diberlakukan.